

## Ideologi dalam Wacana Buku Pelajaran Bahasa Indonesia Terbitan Kemdikbud Edisi Revisi 2017

Angela Klaudia Danu

Antonius Nesi

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

Pos-el: angelaklaudia037@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v7i3.359

### Abstrak

Penelitian ini muncul atas satu pertanyaan mendasar, "Bagaimanakah konstruksi ideologi dalam wacana buku pelajaran Bahasa Indonesia terbitan Kemdikbud edisi revisi 2017?" Sebungan dengan pertanyaan mendasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi ideologi yang terdapat dalam buku pelajaran bahasa Indonesia terbitan Kemdikbud edisi revisi 2017. Sumber data penelitian ini ialah wacana-wacana nonfiksi yang terdapat dalam buku pelajaran Bahasa Indonesia. Berdasar pada fakta bahwa data-data penelitian ini telah tersedia di dalam buku pelajaran, maka dalam pengumpulan data penelitian menggunakan metode studi dokumentasi yang diaplikasikan melalui teknik bacadancat. Analisis data penelitian ini memanfaatkan metode analisis konten. Langkah-langkah analisis data penelitian ini, yakni peneliti (1) memasukkan wacana nonfiksi ke dalam tabulasi data, (2) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis ideologi yang terkandung dalam setiap wacana, (3) menginterpretasi atau memaknai setiap ideologi yang telah ditemukan berdasarkan paradigma wacana kritis. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa jenis-jenis ideologi yang terdapat dalam buku pelajaran bahasa Indonesia terbitan Kemdikbud edisi revisi 2017 pada dasarnya ialah ideologi Pancasila yang dapat dirinci menjadi 3 (tiga), yakni (a) nasionalisme, (b) liberalisme, dan (c) sosialisme.

### Kata Kunci

buku pelajaran, bahasa Indonesia, ideologi, wacana kritis

### Abstract

*This research arises from a fundamental question, "How is the construction of ideology in the discourse of Indonesian language textbooks published by the Ministry of Education and Culture in the 2017 revised edition?" In connection with these basic questions, this study aims to describe the ideological constructions contained in the revised 2017 edition of the Indonesian language textbook published by the Ministry of Education and Culture. The data sources for this research are non-fiction discourses contained in Indonesian language textbooks. Based on the fact that the data of this research are already available in textbooks, in collecting data the researcher uses the documentation study method which is applied through reading and note-taking techniques. The data analysis of this research utilizes the content analysis method. The steps of data analysis in this research, namely the researcher (1) inserting non-fiction discourse into the data tabulation, (2) identifying and classifying the types of ideologies contained in each discourse, (3) interpreting or interpreting each ideology that has been found based on the paradigm. critical discourse. Based on the results of data analysis, it was found that the types of ideologies contained in Indonesian language textbooks published by the 2017 revised edition of the Ministry of Education and Culture are basically Pancasila ideology which can be broken down into 3 (three), namely (a) nationalism, (b) liberalism, and (c) socialism.*

### Keywords

*textbooks, bahasa, ideology, critical discourse*

### Pendahuluan

Wacana sebagai praktik sosial senantiasa lahir dari adanya konstruksi ideologi. Menurut Subagyo (2010), dalam penerapannya praktik sosial memiliki tujuan berwacana, termasuk untuk menjalankan kekuasaan. Praktik wacana dapat menampilkan efek ideologi, yakni suatu hubungan kekuasaan yang berdampak pada munculnya kelas sosial di masyarakat. Sehubungan dengan itu, suatu wacana yang ditampilkan dalam sebuah teks perlu ditelaah untuk mengungkap motif-motif ideologis di baliknya (Nesi & Rampung, 2020). Penelitian ini memanfaatkan wacana-wacana di dalam buku pelajaran (buku paket atau buku teks) bahasa Indonesia untuk menelaah motif-motif ideologis di dalamnya. Hal ini didasari fakta bahwa hingga saat ini buku

pelajaran masih memegang peran penting dalam pembelajaran di kelas. Buku pelajaran dapat memberi dukungan bagi guru dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran dengan lebih mudah.

Hasil penelitian Muchti & Dewi (2019) menunjukkan bahwa wacana-wacana buku pelajaran bahasa Indonesia terbitan Kemdikbud masuk ke dalam kategori sangat baik. Hal itu dapat diketahui dari muatan isi atau teks yang relevan dengan situasi bangsa dan Negara, serta dapat menunjang pencapaian kompetensi berbahasa Indonesia sebagaimana dituntut di dalam kurikulum nasional. Richard (2001) mengemukakan bahwa hadirnya buku pelajaran dapat menguntungkan guru dan siswa dalam standarisasi. Artinya, penggunaan buku pelajaran dalam sebuah program dapat memastikan bahwa siswa di kelas yang berbeda dapat menerima konten yang sama dan karena itu dapat diuji dengan cara yang sama. Buku pelajaran dengan kualitas yang baik dapat menjamin kualitas kompetensi siswa, sehingga siswa dapat belajar mandiri, mengadakan latihan mandiri, berlatih secara mandiri dan bertahap. Hal itu tentu berdampak pada pencapaian kompetensi. Sebuah buku pelajaran, karena itu, harus dikemas dengan menimbang kualitas konten (isi). Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, wacana (teks) yang dihadirkan di dalam buku pelajaran dikategorikan sebagai kualitas isi. Oleh karena itu, wacana-wacana di dalam buku pelajaran bahasa Indonesia patut mendapatkan attensi.

Konstruksi ideologi di dalam sebuah wacana yang disajikan di dalam buku pelajaran bahasa Indonesia perlu ditelaah secara ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan *frame* analisis wacana kritis untuk mengungkap konstruksi ideologi yang terdapat di dalam buku pelajaran bahasa Indonesia. Kajian wacana termasuk ke dalam kajian bahasa dalam penggunaannya. Darma (2009) mengemukakan bahwa analisis wacana merupakan disiplin kebahasaan yang berusaha mengkaji penggunaan bahasa yang nyata dalam komunikasi. Hal itu berarti kajian wacana tidak hanya berkenaan dengan kajian kepemilikan kebahasaan tetapi juga faktor-faktor nonkebahasaan yang menentukan apakah sebuah pesan dapat diterima atau tidak dalam kegiatan komunikatif. Lebih dari itu, sebuah wacana juga perlu ditelaah secara kritis. Telaah kritis terhadap sebuah wacana dikaji oleh analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis tidak hanya menganalisis penggunaan bahasa dan menjelaskan pesan yang terkandung di dalamnya tetapi berupaya memahami mengapa bahasa itu digunakan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Fairclough (2005, dalam Eriyanto, 2001), prinsip dasar analisis wacana kritis meliputi (1) menyasar persoalan-persoalan sosial, (2) mengungkap relasi kekuasaan dalam bentuk diskursus, (3) mengungkap struktur sosial, budaya, dan ideologi, (4) menelaah sisi historis terbentuknya wacana, (5) mengelaborasi hubungan antara teks dan dimensi sosial sebagai mediasi, (6), analisis bersifat interpretatif dan ekplanatif, dan (7) menyibak bentuk-bentuk tindakan sosial. Dalam kaitan dengan itu, para pakar menyatakan bahwa ideologi senantiasa menjadi pokok bahasan dalam analisis wacana kritis karena ideologi sendiri merupakan prinsip yang tersamar di dalam sebuah wacana (Renkema, 2004; Blommaert, 2005; Wooffitt, 2005). Hal itu telah diargumentasikan Fairclough, Mulderrig, dan Wodak (2011) bahwa, “*The ideological loading of particular ways of using language and the relations of power which underlie them are often unclear to people.*”

Selanjutnya, Fairclough dan Wodak (Eriyanto, 2001) mencatat bahwa ciri-ciri analisis wacana kritis menyangkut 5 (lima) hal, yakni (1) tindakan, (2) konteks, (3) historis, (4) kekuasaan, dan (5) ideologi. Berkaitan dengan tindakan, wacana dapat dijalankan sebagai bentuk interaksi. Wacana, pada hakikatnya, ada dalam ruang terbuka dan dapat ditafsirkan dalam ragam perspektif. Pada sisi lain, wacana juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol, bukan sesuatu yang ada diluar kendali penggunanya.

Konteks dalam analisis wacana kritis meliputi konsep kritis, kekuasaan, historis, dan ideologi (Wodak, 2007; 2015). Sementara itu, Van Leeuwen (2005), juga Wodak & Meyer (2009) memasukkan konteks sosial, budaya, situasi, dan kognisi sebagai bagian dari konteks dalam analisis wacana kritis. Dengan demikian wacana kritis merupakan perwujudan teks dan konteks secara bersama-sama. Dalam kaitan dengan konsep tersebut, wacana bisa ditafsirkan dalam kondisi dan situasi yang khusus. Oleh karena itu, analisis wacana kritis menempatkan teks pada situasi tertentu, atau wacana berada dalam situasi sosial tertentu. Meskipun demikian, tidak semua konteks dimasukkan dalam analisis, hanya yang relevan dan berpengaruh atas produksi dan penafsiran tekslah yang dimasukkan ke dalam analisis (Eriyanto, 2001).

Lebih dari itu, dalam analisis wacana kritis perlu dipertimbangkan aspek historis. Ketika analisis wacana kritis menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu berarti wacana tersebut diproduksi dalam konteks historisnya. Eriyanto (2001) menyebut bahwa salah satu aspek yang penting untuk bisa memahami

makna suatu teks ialah dengan menempatkan wacana tersebut dalam konteks historisnya.

Pada sisi lain, aspek kekuasaan menjadi salah satu ciri utama analisis wacana kritis. Setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan merupakan salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Akhirnya, analisis wacana kritis meneropong ideologi yang tersembunyi dalam penggunaan bahasa. Teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi yang harus diungkap agar makna dan/atau kepentingan serta ideologi yang tersebunyi dapat tersibak (Eriyanto, 2001).

Berdasar pada seluruh paparan di atas, penelitian ini mengkaji konstruksi ideologi di dalam buku pelajaran. Penelitian Hendrawanto & Mulyani (2017) dalam telaah mengenai buku pelajaran bahasa Indonesia terbitan Kemdikbud menemukan bahwa aspek kebahasaan dan isi buku tersebut tergolong kurang layak sehingga direkomendasikan agar kedua aspek tersebut perlu diperbaiki sehingga buku teks tersebut layak digunakan guru dan siswa. Hasil penelitian ini berhenti pada telaah internal bahasa dan isi tetapi belum menyinggung aspek eksternal dari penggunaan bahasa. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini justru memanfaatkan aspek eksternal bahasa untuk mengelaborasi muatan-muatan ideologi yang terkandung di dalam wacana buku pelajaran.

Penelitian lain dilakukan Anantama & Saktiono (2019). Dalam penelitian tersebut berhasil disibak bahwa nilai-nilai nasionalisme yang ditemukan dalam buku ajar bahasa Indonesia di SMA meliputi cinta tanah air, patriotisme, harapan kemerdekaan, pemujaan terhadap pahlawan, bangga pada bahasa nasional, dan pengenangan kejayaan masa lalu. Penelitian tersebut membatasi fokus kajian pada salah satu jenis ideologi, yakni nasionalisme. Sementara itu, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan anake jenis ideologi yang terdapat dalam wacana-wacana pada buku pelajaran bahasa Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berkontribusi untuk pemangku kepentingan (otoritas/pemerintah, pakar, dan guru) untuk menimbang wacana-wacana yang akan layak diakomodasi di dalam buku pelajaran.

Bertalian dengan itu, para siswa diharapkan mampu memberikan teladan bagaimana seharusnya menjunjung sikap nasionalisme dalam masyarakat yang begitu kaya akan perbedaan. Hal ini selaras dengan amanat UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menyuratkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab(Alfiana, 2019; Irhandayaningsih, 2012; Tasai, Jayawati, & Subardini, 2002).

Dalam kenyataannya, wacana-wacana dalam buku pelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang termuat dalam silabus. Dengan kata lain, wacana-wacana yang dikonstruksi dalam buku pelajaran bahasa Indonesia, baik untuk guru maupun siswa senantiasa berpijak pada kurikulum. Kurikulum sendiri, pada konteks ini, dapat dipahami sebagai kebijakan di dalam dunia pendidikan sehingga wacana-wacana yang dihadirkan di dalam buku pelajaran senantiasa tidak lepas dari kepentingan politik pemerintah serta ideologi yang hendak dibangun di dalamnya(Utami, 2012).

Wacana atau teks-teks, baik fiksi maupun nonfiksi, di dalam buku pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa SMA/MA/SMK merupakan objek gagasan yang dijadikan sebagai materi pembelajaran bahasa Indonesia. Sebagai objek gagasan atau materi pembelajaran, teks-teks tersebut harus dibedah untuk menemukan konstruksi ideologi yang terimplisit di dalamnya. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia tidak sekadar mengantar siswa pada kompetensi pemahaman materi melainkan juga memberikan kontribusi bagi guru dan siswa untuk bersikap kritis sebagai salah satu jenis keterampilan abad ke-21. Menurut Alfiana (2019), buku ajar menjadi salah satu sumber belajar yang menjadi bagian penting dalam mendukung pembelajaran. Dalam penjelasan Richard (2001), sebagai sumber pembelajaran, buku pelajaran sangat membantu serta mempermudah kegiatan belajar-mengajar. Oleh karena itu, bahan ajar yang digunakan perlu diperhatikan dengan saksama, sehingga buku pelajaran bisa menjadi pemandu pembelajaran yang autentik. Atas dasar itu, kiranya penting untuk mengetahui muatan ideologi yang ada dalam buku ajar siswa. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana guru dapat membangun pemahaman siswa tentang ideologi-ideologi yang ada dalam buku pelajaran. Dalam telaah awal, peneliti menemukan, misalnya, muatan ideologi

sebagaimana terdapat dalam wacana berikut.

“Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut, bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu. Dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah makan dan minum. Sementara itu, yang paling puncak adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Namun demikian, pada umumnya demonstrasi massa justru lebih didasari oleh kebutuhan tingkatan akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. Karena merasa dibiarkan, hak-haknya diingkari, bahkan dinistakan, kemudian mereka berusaha untuk menunjukkan jati dirinya dengan cara berdemonstrasi”(Buku Pelajaran BI SMA Kelas XI, 2017, hal.49).

Wacana tersebut memuat ideologi demokrasi. Sistem demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang di dalamnya melibatkan rakyat dan memberi kebebasan untuk setiap warga negara untuk menjalankan hak dan kewajibannya dalam menyampaikan pendapat. Berdasarkan kutipan di atas, demonstrasi dapat dilihat sebagai salah satu prinsip-prinsip demokrasi, yakni sebagai wadah atau forum warga negara menyampaikan pendapat ataupun ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian, demonstrasi bukanlah hal yang baru bagi masyarakat. Demonstrasi dipilih oleh masyarakat agar pemerintah cepat merespon kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Melalui demonstrasi mereka merasa menunjukkan jati dirinya yang kurang mendapatkan perhatian, diabaikan, dibiarkan, hak-haknya diingkari. Melalui demonstrasi mereka berusaha merebut kembali hak-hak dan eksistensi diri mereka agar diakui.

Selain ideologi nasionalisme yang di dalamnya memuat nilai demokrasi, dalam telaah awal peneliti juga menumukan konstruksi ideologi nasionalisme yang memuat nilai religius sebagaimana terdapat pada wacana berikut.

“Oleh sebab itu, sudah sewajarnyalah jika kita bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan Doa kepada Allah agar arwah mereka diterima-Nya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Semoga mereka diampuni segala dosanya dan dilimpahi rahmat yang sebanyak-banyaknya. (D3/T2/I.Nas.)

Kutipan wacana tersebut memuat ideologi nasionalisme yang di dalamnya terdapat nilai religius (Ketuhanan). Sikap patriotisme para pahlawan bangsa, di dalam teks itu, tidak cukup dikenang dengan menghafal nama-nama mereka, tetapi sebagai Negara yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap pemeluk agama memiliki kewajiban moral untuk mendoakan mereka seturut agama dan kepercayaannya(Wicaksono, 2017; Rawantina, 2013; Gunawan, 2013).

Nilai ideologi nasionalisme juga dapat dilihat dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa dan bahasa resmi Negera. Bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa selain berfungsi sebagai sarana komunikasi juga sebagai alat pemersatu bangsa. Kebanggaan akan bahasa nasional diwujudkan dalam penggunaan bahasa nasional dalam komunikasi sehari-hari daripada menggunakan bahasa asing. Namun, keberadaan bahasa Indonesia sudah mulai tersaingi oleh hadirnya bahasa-bahasa yang berasal dari luar. Penggunaan bahasa Nasinal dalam lingkungan masyarakat semakin merosot. Nilai tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Ragam bahasa Indonesia ragam baku mereka anggap kurang “asyik” dibandingkan dengan bahasa gaul, lebih-lebih dengan bahasa Asing, baik itu dalam pergaulan ataupun ketika mereka sudah masuk dunia kerja. Tuntutan kehidupan modern telah membelokkan apresiasi para siswa itu terhadap bahasanya sendiri. Bahasa asing berkesan lebih bergengsi. Pelajaran bahasa Indonesia tak jarang ditanggapi dengan sikap sinis. Mereka merasa lebih asyik dengan mengikuti pelajaran bahasa Inggris atau mata kuliah lainnya”. (D5/T4/I.Nas.)

Berdasarkan telaah awal, peneliti menemukan fenomena bahwa wacana-wacana di dalam buku pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa SMA/MA/SMK terbitan Kemdikbud terdapat beberapa ideologi. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengkaji secara lebih mendalam topik “Konstruksi Ideologi dalam Buku Pelajaran Bahasa Indonesia untuk Siswa SMA/MA/SMK terbitan Kemdikbud edisi revisi 2017. Buku yang dimaksud yakni buku untuk siswa SMA/MA/SMK kelas XI. Berdasarkan uraian tersebut, masalah dalam penelitian ini ialah bagaimanakah konstruksi ideologi pada wacana dalam buku pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa SMA/MA/SMK terbitan Kemdikbud edisi revisi 2017? Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk memerikan konstruksi ideologi yang terkandung dalam buku pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa SMA/MA/SMK terbitan Kemdikbud edisi revisi 2017.

## Metode

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Creswell (2010) dalam penelitian deskriptif kualitatif peneliti menjadi instrumen kunci. Artinya, dengan kemampuan dasar yang dimilikinya, peneliti sendiri menentukan alat/instrumen yang digunakan dalam penelitian. Wujud data penelitian ini ialah bagian-bagian dari wacana (teks) berupa kata, kalimat, dan paragraf yang kutip dari bacaan-bacaan yang terdapat dalam buku pelajaran bahasa Indonesia terbitan Kemdikbud. Sejalan dengan itu, sumber data penelitian ini ialah buku teks bahasa Indonesia untuk siswa SMA/MA/SMK Kelas XI. Dalam penelitian ini peneliti membatasi penyediaan data hanya pada wacana-wacana nonfiksi yang terdapat dalam sumber data, sedangkan wacana-wacana fiksi berupa cerpen, puisi, dan drama tidak dipilih karena wacana-wacana tersebut lebih cocok dianalisis menggunakan paradigma kritik sastra. Sumber data penelitian ini dapat diabstraksikan pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1**  
 Sumber Data

No.	Wacana	Halaman
1.	Demonstrasi Masa	48–49
2.	Kegiatan 1. Memahami Informasi Dan Permasalahan Yang Didengar Atau Dibaca	76–80
3.	Tentang Jepang	84
4.	Tugas. Buatlah simpulan tentang isi teks itu secara keseluruhan!	8–87
5.	Kasus Mencuri Sendal	196–197

Dalam penyediaan data, peneliti menggunakan metode studi dokumentasi. Menurut Creswell (2010), wujud dokumen dapat berupa dokumen pribadi ataupun dokumen publik. Dokumen pribadi merupakan dokumen yang dimiliki seseorang, yang dalam batas dan kapasitas tertentu, dapat diteliti (misalnya dalam bentuk studi kasus) untuk kepentingan umum. Sementara itu, dokumen publik merupakan dokumen yang diakses umum dan bersifat publik. Wacana-wacana nonfiksi dalam buku pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa SMA dikategorikan sebagai dokumen publik. Metode dokumentasi dalam penelitian diaplikasikan peneliti melalui teknik baca dan catat (Sudaryanto, 2015). Prosedur penerapan teknik baca dan catat dalam pengumpulan data meliputi: (1) peneliti membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan wacana-wacana dari sumber data, (2) peneliti menelaah setiap wacana dan menentukan bagian wacana yang akan dianalisis, (3) peneliti membuat kodifikasi data, (4) peneliti melakukan triangulasi data.

Metode analisis data penelitian ini memanfaatkan metode analisis konten (isi). Dalam menerapkan metode analisis isi, peneliti mengikuti prosedur analisis data dengan langkah-langkah, yakni, peneliti (1) memasukkan wacana-wacana nonfiksi yang terdapat dalam buku pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa SMA/MA/SMK kelas XI; (2) mengidentifikasi jenis-jenis ideologi yang terdapat di dalam wacana-wacana yang ada; (3) membuat klasifikasi ideologi berdasarkan karakteristik data; (4) menginterpretasi dan merefleksikan secara kritis jenis-jenis ideologi yang telah diidentifikasi; dan (5) memberikan makna dari ideologi-ideologi yang terkandung dalam buku pelajaran.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa jenis-jenis ideologi yang terdapat dalam buku pelajaran bahasa Indonesia terbitan Kemdikbud edisi revisi 2017 pada dasarnya ialah ideologi Pancasila yang dapat dirinci menjadi 3 (tiga), yakni (a) nasionalisme, (b) liberalisme, dan (c) sosialisme. Adapun nilai-nilai dari ideologi-ideologi tersebut ialah nilai ketuhanan, tata krama/etika, demokrasi, toleransi, persatuan dan kesatuan, dan keadilan sosial. Secara terperinci, kutipan data penelitian ini serta hasil identifikasi dan pemaknaannya dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2**  
 Hasil Analisis Data

No.	Data	Jenis Ideologi	Nilai Ideologi
1.	“Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut, bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu. Dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah makan dan minum. Sementara itu, yang paling puncak adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Namun demikian, pada umumnya demonstrasi massa justru lebih didasari oleh kebutuhan tingkatan akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi	Nasionalisme	demokrasi

No.	Data	Jenis Ideologi	Nilai Ideologi
	mereka diakui. Karena merasa dibiarkan,hak-haknya diingkari, bahkan dinistakan, kemudian mereka berusaha untuk menunjukkan jati dirinya dengan cara berdemonstrasi”. (D1/T3/I.Dem.)		
2.	“Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Misalnya, kesantunan (tata krama) yang berlaku pada zaman kerajaan yang berbeda dengan yang berlangsung pada masa kemerdekaan dan pada masa kini. Kesantunan juga berkaitan dengan tempat: nilai-nilai kesantunan di kantor berbeda dengan di pasar, di terminal, dan di rumah”. (D2/T1/I.Nas.)	Nasionalisme	Tata krama/etiket
3.	“Oleh sebab itu, sudah sewajarnyalah jika kita bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan Doa kepada Allah agar arwah mereka diterima-Nya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Semoga mereka diampuni segala dosanya dan dilimpahi rahmat yang sebanyak-banyaknya. (D3/T2/I.Nas.)	Nasionalisme	Religius/Ketuhanan, patriot
4.	“Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Kelompok pertama adalah mereka yang kurang memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan yang menurut sindiran siswa kelompok kedua sebagai ragam bahasa Kampung Rambutan. Bahasanya orang-orang Betawi”. (D4/T4/IN)	Nasionalisme	Keragaman/persatuan dan kesatuan
5.	“Ragam bahasa Indonesia ragam baku mereka anggap kurang “asyik” dibandingkan dengan bahasa gaul, lebih-lebih dengan bahasa Asing, baik itu dalam pergaulan ataupun ketika mereka sudah masuk dunia kerja.Tuntutan kehidupan modern telah membelokkan apresiasi para siswa itu terhadap bahasanya sendiri. Bahasa asing berkesan lebih bergengsi. Pelajaran bahasa Indonesia tak jarang ditanggapi dengan sikap sinis. Mereka merasa lebih asyik dengan mengikuti pelajaran bahasa Inggris atau mata kuliah lainnya”. (D5/T4/I.Nas.)	Nasionalisme	Keragaman/persatuan dan kesatuan
6.	“Cara kerja mereka seperti dipandang tidak punya arti apa pun bagi kepentingan negara dan rakyat secara luas. Perlakuan itu hanya memenuhi syahwat dan arogansi para penguasa. Padahal keberadaan aparat penegak hukum adalah untuk menjadikan negara dan rakyatnya memperoleh rasa aman dan sejahtera. Sementara itu, keamanan dan kesejahteraan di mana-mana sedang dikuasai oleh mafia-mafia dan para koruptor. Hampir setiap waktu masyarakat mengeluhkan fasilitas umum yang rusak, pelayanan publik yang tidak profesional dan sarat pungli, serta sistem peradilan yang memihak. (D6/T5/I.Nas.)	Nasionalisme	Keadilan
7.	“Anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari, selama seperempat jam dengan para guru. Itulah yang menyebabkan munculnya generasi Jepang yang sederhana dan suka pada kebersihan. Para siswa belajar menjaga kebersihan karena dalam mengatasi kebersihan merupakan bagian dari etika Jepang. Siswa Jepang, dari tahun pertama hingga tahun keenam sekolah dasar harus belajar etika dalam berurusan dengan orang-orang.Pekerja kebersihan di Jepang dimaksudkan untuk menciptakan Kesehatan. Oleh karena itu, mereka sering disebut “insinyur kesehatan” dan mendapatkan gaji setara dengan Rp50 Juta per bulan. Untuk merekrut mereka dilakukan melalui tes tertulis dan wawancara. Jepang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia. Mereka sering terkena gempa bumi, tetapi itu tidak mencegah Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Rakyat Jepang mengatasi kekurangan sumber daya alam dengan mengoptimalkan sumber daya lainnya.Jika kamu pergi ke sebuah restoran prasmanan di Jepang maka kamu akan melihat orang-orang yang hanya makan sebanyak yang mereka butuhkan. Dengan begitu, tidak ada sisa-sisa makanan. Selain itu, dari restoran tidak ada limbah apa pun. Masyarakat Jepang sangat menghargai waktu. Mereka selalu menepati waktu. Bahkan, tingkat keterlambatan kereta di Jepang hanya sekitar 7 detik per tahun. Budaya mereka dalam menghargai nilai waktu sangat dijaga sehingga mereka sangat tepat waktu, dengan perhitungan menit dan detik”. (D7/T3/I.Lib.)	Liberalisme	Persamaan derajat, hak dan kewajiban

8.	“Seorang remaja berinisial AAL, gara-gara mencuri sandal, ia harus di meja hijaukan, kemudian divonis bersalah. Masyarakat memandang bahwa aparat penegak hukum sudah keterlaluan, berlaku sistem tebang pilih. Kasus hukum yang ecek-ecek diperkarakan, sementara masih banyak kejahanatan serius yang dipandang sebelah mata. Koruptor yang menggasak uang negara miliaran, bahkan triliunan rupiah, dibiarkan melengang bebas, tidak diotak-atik, tanpa tersentuh hukum. (D13/T5/I.Sos.)	Sosialisme	Keadilan sosial
9.	“Harapan rakyat, keberadaan para pengadil itu bukan untuk mengurus perkara yang ecek-ecek. Mencuri tetap merupakan perbuatan salah. Akan tetapi, mereka haruslah memiliki prioritas dan nurani. Kasus-kasus berkelas kakap semestinya menjadi sasaran utama. Korupsi besar-besaran diindikasikan hampir terjadi di setiap instansi, tetapi yang terjadi kemudian hanya satu-dua kasus yang terungkap. Itu pun ketika sampai di meja pengadilan banyak yang lolos, tidak masuk bui. Aparat penegak hukum beraninya terhadap kaum sandal jepit, orang-orang miskin yang papa. Namun, mereka loyo ketika berhadapan dengan perkara para penguasa dan orang-orang kaya. Dalam perhitungan ilmu Ekonomi, apa yang mereka perbuat, jauh dari harapan untuk bisa <i>breakEvent point</i> antara pemasukan dengan pengeluaran masih sangat timpang. Rakyat akhirnya tekor. Mereka dihidupi dan dibiayai dengan “modal” besar”. (D14/T5/I.Sos.)	Sosialisme	Keadilan sosial
10.	“Polisi dan jaksa disibukkan oleh kasus-kasus sepele, seakan-akan tidak ada kasus lain yang jauh lebih urgen. Kasus pencurian sandal butut dan uang yang hanya seribu perak, sebenarnya bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Logikanya kalau segala kenakalan remaja itu diperkarakan, penjara akan penuh dengan manusia-manusia belia. Bisa jadi nanti semacam kasus <i>nyolong</i> permen kena penjara, menghilangkan buku perpustakaan dibui, mematahkan pagar bambu balai kelurahan didakwa, menginjak sepatu tentara disidangkan (D15/T5/I.Sos.)	Sosialisme	Keadilan sosial

## Pembahasan

### Ideologi Nasionalisme

Nasionalisme merupakan sikap seseorang memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sikap nasionalisme warga negara harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perubahan zaman. Sikap nasionalisme berakar pada kesadaran dari dalam diri untuk selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh banyak orang. Nasionalisme juga memberikan identitas sosial pada diri seseorang, sehingga ada rasa yang sama atau tanggungjawab yang sama untuk diperjuangkan di dalam kehidupan bersama. Deskripsi tersebut tergambar pada data 1 (D1/T3/I.Nas.).

Adapun nilai dari ideologi nasionalisme yang terkandung pada data 1 (D1/T3/I.Nas.) ialah demokrasi. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat/khalayak dan *kratos* artinya pemerintahan. Jadi, secara harafiah demokrasi berarti pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(BadanBahasaKemdikbud, 2008), demokrasi adalah sistem atau bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya ikut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Dapat dikatakan, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberi warga negaranya untuk bebas berpendapat dan berpartisipasi dalam pembuatan hukum. Artinya, segala keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat, segala hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kehendak rakyat harus dilakukan sesuai aturan yang tertuang dalam UU.

Sistem demokrasi memiliki beberapa prinsip, salah satunya ialah adanya kekebasan pers agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya ke pemerintah. Berdasarkan kutipan 1 (D1/T3/I.Dem.), demonstrasi merupakan salah satu implementasi dari prinsip demokrasi, yakni medium bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat ataupun ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Dalam praktiknya, demonstrasi bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Seringkali aksi demonstrasi dipilih oleh masyarakat Indonesia sebagai aksi penyampaian aspirasi secara terbuka agar pemerintah cepat merespon aneka kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Melalui demonstrasi masyarakat merasa menunjukkan jati dirinya yang kurang mendapatkan

perhatian, diabaikan, diingkari. Melalui demonstrasi, masyarakat berusaha merebut kembali hak-hak dan eksistensi mereka agar diakui.

Pada wacana data 2 (D2/T1/I.Nas.) dieksplisitkan mengenai menurunnya sikap nasionalisme. Kutipan data tersebut hendak mengingatkan setiap anak bangsa bahwa saat ini muncul fenomena di dalam masyarakat yang memerlukan penghayatan terhadap dimensi nasionalisme itu. Sebagai contoh, pada era digital saat ini, ketika merebak fenomena penggunaan media sosial jejaring, banyak orang sudah tidak lagi mengindahkan tata krama atau sopan santun, penerapan nilai-nilai moral yang merosot, serta kurangnya perhargaan terhadap budaya, agama, rasa, dan suku. Pluralisme sebagai kekhasan bangsa menjadi terancam karena ulah sekelompok orang yang mulai terpengaruh pada ideologi luar. Tentu, banyak faktor yang menyebabkan rasa atau sikap nasionalisme semakin menurun, di antaranya masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama, perkembangan teknologi yang begitu pesat tanpa diimbangi literasi pemanfaatnya, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam meningkatkan rasa kecintaan terhadap tanah air. Dalam kaitan dengan itu, hendaknya setiap warga negara tetap mempertahankan sikap nasionalisme dengan mewujudkannya dalam praktik hidup, dimulai dari hal-hal kecil seperti menjaga kerukunan antarwarga, menghargai diri sendiri dan sesama, aktif mendukung kegiatan pemerintah, menjunjung tinggi keadilan, tanggung jawab, hingga tetap cinta terhadap tanah air dan bangsa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai utama dari ideologi nasionalisme yang terimplisit dalam data 2 ialah tata krama atau sopan santun sebagai wujud nilai adiluhung dari nenek moyang bangsa Indonesia.

Pada data 3 (D3/T2/I.Nas.) diimplisitkan bahwa sikap nasionalisme harus terus dipertahankan untuk memperjuangkan serta meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa. Wacana tersebut dapat menggugah hati setiap anak bangsa untuk tetap mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang telah mengorbankan nyawa dalam mempejuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap cinta tanah air (nasionalisme) mesti juga terpatri di dalam sikap patriotik, yakni sikap pengobarnan. Dalam konteks Indonesia saat ini, sikap tersebut perlu ditanamkan kepada generasi muda melalui perjuangan melawan ideologi-ideologi luar yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai bangsa yang berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa, setiap warga negara juga memiliki kewajiban moral untuk mendoakan para pahlawan bangsa. Nilai religius ini yang secara eksplisit dinyatakan pada data 3.

Data 4 (D4/T4/Nas.) masih memuat ideologi nasionalisme. Nilai luhur yang terkanndung dalam data tersebut ialah penghargaan terhadap pluralitas atau keragaman. Pluralitas, dalam konteks Indonesia, merupakan kekayaan bangsa yang dihimpun dalam satu wadah "Nusantara". "Bhinneka Tunggal Ika" merupakan semboyan yang disepakati sebagai filosofi persatuan dan kesatuan. Wacana pada data 4 muncul sebagai reaksi terhadap adanya degradasi penghayatan terhadap pluralisme yang kian terancam. Sebagaimana terdeskripsi pada teks tersebut, praktik sosial dan budaya yang dimaksud ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa terdapat dua kelompok sosial yang memiliki sikap berbeda terhadap praktik budaya, khususnya bahasa. Fenomena sosial dan budaya tersebut tentu menjadi suatu masalah yang perlu disikapi, sehingga wajar bahwa wacana tersebut dihadirkan di dalam buku pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak sekadar sebagai produk budaya, namun merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Wacana pada data 4 juga mengimplisitkan bahwa bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa telah dirusak oleh bahasa asing. Stabilitas bahasa Indonesia terancam dengan adanya serbuan istilah-istilah yang kian bertambah. Satu-satunya cara untuk mengantisipasi pemertahanan bahasa Indonesia ialah tetap merawat jati dirinya, menyerap bahasa asing sesuai sistem atau aturan penyerapan bahasa Indonesia yang berlaku setutur pedoman penyerapan istilah, serta menggunakan istilah asing sesuai urgensi dan kebutuhan.

Kutipan (D6/T5/I.Nas.) menunjukkan bahwa penghayatan ideologi nasionalisme menurun. Sosiolog Inggris, Anthony D. Smith, mendefenisikan nasionalisme sebagai suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan dan identitas bagi suatu populasi yang jumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu bangsa yang aktual atau bangsa yang potensial. Dalam kaitan dengan data 6, sikap penegak hukum pada kutipan tersebut kurang mencerminkan sikap nasionalisme untuk membentuk suatu bangsa yang potensial. Wacana tersebut ditampilkan di dalam buku pelajaran bahasa Indonesia sebagai bentuk kritik terhadap arogansi aparat yang kadangkala, dalam praktiknya, tidak mengayomi masyarakat tetapi justru melakukan tindakan sewenang. Padahal, negara ini merupakan negara hukum, artinya, setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.

### Ideologi Liberalisme

Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik utama. Secara umum, liberalisme mencitakan suatu masyarakat bebas, yang dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi individu. Wacana pada data 7 (D7/T3/ I.Lib.) mengimplisitkan ideologi liberalisme. Pada data tersebut terlihat ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi negara Jepang yang sangat kuat dan dapat dijadikan contoh untuk negara lain agar lebih maju. Melalui kutipan ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa dijadikan contoh, di antaranya walaupun negara Jepang memiliki sumber daya yang terbatas, namun negara Jepang mencari alternatif lain untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lain. Selain itu, sistem kehidupan yang telah diatur berdasarkan aturan-aturan dapat menjadi rambu bagi suatu masyarakat untuk hidup tertib, disiplin, menghargai dan peduli terhadap waktu, serta menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara.

Dalam kaitan dengan pendidikan (pembelajaran), wacana sebagaimana data 7 dipandang relevan karena dapat berkontribusi untuk menanamkan karakter disiplin, tertib dan menjadikan siswa berkarakter liberalis (merdeka secara bertanggung jawab), terutama dalam hal berpendapat atau berargumen, baik lisan maupun tulis. Dalam konteks itu, ideologi liberalisme dipandang menjadi bagian yang tidak bertentangan dengan Pancasila karena pada prinsipnya Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang berarti nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya Indonesia, terutama dalam hal praktik kebebasan berpendapat dan berserikat (Surajiyo, 2020). Kelak, hal itu memiliki dampak positif untuk kehidupan siswa karena karakter yang telah ditanamkan kepadanya dapat menunjang transformasi sosial yang bermartabat (Wisarja & Sudarsana, 2017; Syahrul, 2018).

### Ideologi Sosialisme

Istilah sosialisme atau *socialism* berasal dari bahasa Perancis, *sosial*, artinya kemasyarakatan. Istilah ini pertama kali muncul di Perancis pada 1830. Sosialisme, mengacu pada konteks historisnya, muncul sebagai reaksi terhadap perkembangan dunia industri, faham yang bercita-cita mewujudkan suatu masyarakat berdasarkan hak milik bersama terhadap alat-alat produksi. Tujuannya ialah agar produksi tidak lagi diselenggarakan oleh orang atau lembaga perorangan guna memperoleh laba tetapi untuk melayani kebutuhan masyarakat (Fogg, 2020; Wikandaru, & Cahyo, 2016). Dari batasannya ini dapat dikatakan bahwa ideologi sosialisme mengutamakan kepentingan bersama sebagai tujuan hidup dan kepentingan individu di sampingkan, sehingga negara harus ikut campur untuk mengurus kehidupan bersama demi mencapai tujuan didirikannya suatu negara. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa sosialisme sebagai suatu faham muncul sebagai akibat ketidakadilan pemerintah dan pemihakan kalangan tertentu (termasuk agamawan dan kapitalis) terhadap penguasa (Khalik, 2012).

Data 8, 9, 10 (D13/T5/I.Sos., (D14/T5/I.Sos., dan (D15/T5/I.Sos.) mengimplisitkan ideologi sosialisme. Dari sisi konten atau isi, data-data tersebut mengacu pada makna bahwa kepemilikan pribadi harus diakui tetapi tetap menjunjung tinggi kehidupan bersama, dan dalam praktik hidup orang setiap warga negara mesti lebih mementingkan kemaslahatan bersama tanpa abai memperjuangkan kesejahteraan hidupnya sendiri. Kritik terhadap ideologi sosialisme sebenarnya tertuang dalam ideologi Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Wacana-wacana itu hadir di dalam buku pelajaran lebih sebagai penanaman ideologi Pancasila yang berakar pada dimensi kebudayaan Indonesia dalam memaknai keadilan sosial daripada sosialisme ekstrem.

### Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti mengambil simpulan bahwa wacana-wacana di dalam buku pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas XI SMA/MA/SMK terbitan Kemdikbud edisi revisi 2017 pada dasarnya ialah ideologi Pancasila yang terdiri atas nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam wacana-wacana tersebut ialah demokrasi, tatakrama/etiket, religius, patriotik, keragaman, persatuan dan kesatuan, persamaan hak dan kewajiban, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, serta keadilan sosial. Sejalan dengan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan beberapa saran berikut. Pertama, topik penelitian ini perlu dielaborasi lebih dalam lagi dengan memperluas sumber data, misalnya, bukan hanya buku pelajaran bahasa Indonesia, tetapi buku pelajaran pada mata pelajaran lain seperti buku pelajaran Sejarah, Pendidikan Kewarganegaraan, dan lain-lain, baik tingkat mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK. Dengan sumber data yang beragam serta jangkauan yang lebih luas, hasil penelitian akan lebih

representatif untuk mengambil suatu simpulan final tentang konstruksi ideologi di buku-buku pelajaran. Kedua, bagi para guru bahasa Indonesia, hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian untuk dipertimbangkan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam hal pemilihan teks yang lebih tepat untuk mengakomodasi, bukan hanya kompetensi pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum nasional tetapi juga pembentukan karakter kaum muda dalam menanamkan ideologi Pancasila sebagai faham yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia.

## Daftar Rujukan

- Alfiana, L. N. (2019). "Nilai Nasionalisme pada Buku Teks Bahasa Indonesia SMP Kelas VII KURikulum 2013 Edisi REvisi 2017 (Kajian Semiotik Charles Sanders Pierce)." *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 11(2), 34–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/st.v11i2.2355.g1710>.
- Anantama, Muhsaryam Dwi; Saktiono, H. S. (2019). "Akomodasi Nilai-Nilai Nasionalisme pada Buku Ajar Bahasa Indonesia di SMA." *Konferensi Nasional Bahasa Dan Sastra V*, 5(1), 193–197.
- BadanBahasaKemdikbud. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Blommaert, J. (2005). *Discourse Acritical Introduction*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Darma, Y. A. (2009). *Analisis Wacana Kritis*. Yrama Widya.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS.
- Fogg, K. W. (2020). "Indonesian Socialism of The 1950s: From Ideology to Rhetoric." *Third World Quarterly*, 42(3), 465–482. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1794805>
- Gunawan, R. (2013). "Pembelajaran Nilai-Nilai Pahlawan Kemerdekaan Soekarno dalam Rangka Mengembalikan Karakter Bangsa Indonesia." *E-Journal Widya Non-Eksakta*, 1(1), 1–6.
- Hendrawanto, Yusuf; & Mulyani, M. (2017). "Kelayakan Kebahasaan dan Isi Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas XII Semester 1 SMA." *JP-BSI (Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia)*, 2(2), 58–62. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26737/jpbsi.v2i2.246>
- Irhandayaningsih, A. (2012). "Peranan Pancasila dalam Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda di Era Global." *Humanika*, 16(9), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/humanika.16.9>
- Khalik, A. T. (2012). "Masyarakat Madani dan Sosialisme." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 8(2), 30–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tips.v8i2.1563>
- Muchti, Andina; Dewi, Y. C. (2019). "Kelayakan Buku Teks Bahasa Indonesia Terbitan Balitbang Kemdikbud Dengan Kurikulum 2013 Revisi 2016." *Jurnal Ilmiah Bina Edukasi*, 12(2), 16–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.33557/jedukasi.v12i2.786>
- Nesi, Antonius; Rampung, B. (2020). *Diskursus Pendidikan pada Masa Pandemi: Kajian Kritis Opini Kompas*. Unika Santa Paulus.
- PemerintahIndonesia. (2003). "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional." [https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wpcontent/uploads/2016/08/UU\\_no\\_20\\_th\\_2003.pdf](https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wpcontent/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf)
- Rawantina, I. N. S. (2013). "Penanaman Nilai Nasionalisme dan Patriotisme untuk Mewujudkan Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 4 Sidoarjo." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 36–40.
- Renkema, J. (2004). *Introduction to Discourse Studies*. John Benjamins.
- Richard, J. C. (2001). *Curriculum Development in Language Teaching*. Cambridge University.
- Subagyo, P. A. (2010). "Pragmatik Kritis: Paduan Pragmatik dengan Analisis Wacana Kritis." *Linguistik Indonesia*, 28(2).
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Sanata Dharma University Press.
- Surajiyo. (2020). "Keunggulan dan Ketangguhan Ideologi Pancasila." *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1–11.
- Syahru. (2018). "Kritik Ideologi Pendidikan Karakter dalam Masyarakat Demokrasi di Indonesia." *Seminar Nasional Pendidikan Dan Kewarganegaraan IV*, 58–67.
- Tasai, Sa Amran; Jayawati, Maini Trisna; & Subardini, N. N. (2002). *Semangat Nasionalisme dalam Puisi Sebelum Kemerdekaan*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Utami, I. W. P. (2012). "Wacana Ideologi Negara dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA)" [Universitas Sebelas Maret]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/25908/Wacana-ideologi-negara-dalam-buku-sekolah-elektronik>
- Van Leeuwen, T. (2005). *Introducing Social Semiotics*. Routledge.
- Wicaksono, A. (2017). *Pengkajian Prosa Fiksi*. Garudhawaca.
- Wikandaru, Reno; Cahyo, B. (2016). "Landasan Ontologis Sosialisme." *Jurnal Filsafat*, 26(1), 112–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jf.12627>
- Wisarja, I. Ketut; Sudarsana, I. K. (2017). "Refleksi Kritis Ideologi Pendidikan Konservatisme dan Liberalisme Menuju Paradigma Baru Pendidikan." *Journal of Education Research and Evaluation*, 1(4), 283–291. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jere.v1i4.11925>
- Wodak, Ruth; Meyer, M. (2009). "Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory and Methodology." *Methods of Critical Discourse Analysis*, 2, 1–33.
- Wodak, R. (2007). "Pragmatics and Critical Discourse Analysis: A Cross-Disciplinary Inquiry." *Pragmatics & Cognition*, 15(1), 203–225.
- Wodak, R. (2015). "Critical Discourse Analysis, Discourse-Historical Approach." *The International Encyclopedia of Language and Social Interaction*, 1–14.
- Wooffitt, R. (2005). *Conversation Analysis and Discourse Analysis: A Comparative and Critical Introduction*. Sage Publications.